

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pencemaran air Sungai Batanghari memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, dan mengganggu ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari serta aktivitas ekonomi seperti perikanan dan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan proses implementasi strategi yang tepat untuk mengatasi masalah pencemaran air di Sungai Batanghari di Provinsi Jambi. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi strategi pengendalian pencemaran air di sungai Batanghari ini belum berjalan optimal. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program seperti Pemantauan Indeks Kualitas Air dan Kampung Mantap, pelaksanaannya masih terbentur berbagai kendala. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama, menyebabkan banyak program strategis tidak dapat dijalankan secara maksimal. Selain itu, aktivitas industri dan tambang ilegal seperti PETI tetap menjadi sumber utama pencemaran. Pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif dengan partisipasi publik yang minim. Transparansi dalam pengelolaan lingkungan, termasuk akses terhadap dokumen AMDAL, masih kurang, sementara keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses ini juga terbatas. Untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektoral dan komitmen pemerintah yang lebih tinggi.

Dalam proses Implementasi strategi pengendalian pencemaran air Sungai

Batanghari di Provinsi Jambi menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, serta kondisi alam yang sulit diprediksi. Namun, upaya ini didukung oleh peraturan pemerintah pusat yang menjadi dasar hukum kuat serta peran aktif komunitas peduli lingkungan.

4.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan lebih perlu memperkuat program edukasi lingkungan melalui pelatihan pengelolaan limbah dan sosialisasi bahaya pencemaran air, dengan melibatkan komunitas dan institusi pendidikan.
2. Pemerintah perlu juga meningkatkan alokasi anggaran untuk program pengendalian pencemaran dan jalin kemitraan dengan sektor swasta serta NGO guna mendukung keterbatasan sumber daya.
3. Pemerintah harus memperkuat pengawasan aktivitas industri dan PETI serta tegakkan hukum secara konsisten untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.